

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di daerah, pengembangan sektor pariwisata memiliki pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu sektor pariwisata dapat membantu pelestarian nilai dan budaya lokal, serta berpotensi menjembatani perbedaan sosial budaya dan kesenjangan ekonomi. Namun jika tidak dikembangkan secara terencana dan hati-hati, industri pariwisata juga memberikan peluang bagi munculnya berbagai dampak negatif yang merugikan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kebijakan pengembangan sektor pariwisata daerah haruslah memperhitungkan secara cermat baik dampak positif maupun negatifnya. Peran pemerintah daerah sebagai inisiator, motivator, fasilitator dan advokator dalam konteks ini sangat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata. Selain itu sub sektor pariwisata pun diharapkan dapat menggerakkan ekonomi rakyat, karena dianggap sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Harapan ini dikembangkan dalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan atau *Community Based Tourism Development (CBTD)* (Budianto dan Indrayani, 2013).

Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan UU No 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota dituntut kemampuannya untuk mengatur dan mengurus pembiayaan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengembangan di wilayahnya. Pemerintah beserta masyarakat bersama-sama

bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud nyata kemandirian (otonom) atas daerahnya.

Salah satu potensi sumber-sumber penerimaan daerah yang memiliki peluang dan prospek yang tinggi adalah sektor pariwisata. Semenjak merosotnya penerimaan negara terutama dari sumber alam minyak dan gas bumi pada periode tahun 1980-an, pemerintah serta pakar mulai mengarahkan pandangan dan perhatian untuk mencari potensi dan memanfaatkan potensi dari sektor lain yang dirasakan cukup potensial (Arifiana, 2016).

Pengembangan pariwisata di suatu daerah harus didasarkan pada perencanaan, pengembangan, dan arah pengelolaan yang jelas agar semua potensi yang dimiliki dapat diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapat hasil yang optimal, pengembangan dalam bidang kepariwisataan tidak hanya didukung oleh satu pihak tetapi merupakan kerjasama dari berbagai pihak, baik kalangan usaha (swasta), tokoh adat (budaya) maupun pihak pejabat pemerintah sendiri. Lebih penting lagi adalah adanya keterlibatan masyarakat sebagai salah satu faktor keberhasilan pengembangan pariwisata. Tanpa melibatkan masyarakat, pembangunan pariwisata hanya akan melahirkan produk-produk wisata yang kurang berarti bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi kata kunci pada setiap program pengembangan pariwisata, seolah-olah menjadi label baru yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proyek pengembangan pariwisata (Wardiyanto, 2011).

Pengembangan pariwisata merupakan program jangka panjang dan tidak lepas dari upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup serta budaya masyarakat

setempat. Dengan demikian maka strategi pengembangan pariwisata harus berorientasi pada upaya melibatkan masyarakat baik dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang pada akhirnya akan dapat diwujudkan pengembangan pariwisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Amalia dan Rendra, 2018).

Peraturan Daerah No 02 tahun 2018 menerangkan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. Musyawarah dilakukan dalam rangka peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program pembangunan yang telah disusun.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya wilayah kabupaten di Sumatera Barat yang merupakan wilayah kepulauan. Secara geografis letaknya terpisah dari kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat karena dibatasi oleh laut. Terletak dibagian Barat Sumatera Barat di perairan Samudera Hindia, merupakan gugusan kepulauan yang secara pembentukan merupakan jenis pulau tektonik. (Dinas Pariwisata Kabupaten Mentawai, 2019)

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki luas daerah administrasi 6.011 km, 10 (sepuluh) kecamatan, 43 desa dan 341 dusun yang membujur dari utara Pulau Siberut sampai keselatan Pulau Pagai Selatan dengan panjang garis pantai

adalah 1.402 km. Daerah kepulauan ini serta terdiri dari 1 pulau dengan kategori besar (Pulau Siberut) dan 98 pulau kecil (termasuk Pulau Sipora, Pulau pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan). Wilayah ini yang secara keseluruhan dikelilingi oleh lautan yang berada di Samudra Indonesia atau 90 mil laut dari Kota Padang (Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2017).

Ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Tuapejat, yang merupakan pintu gerbang masuk ke kepulauan ini. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Desa Tuapejat masuk kedalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 69 Tahun 2018. KSPD Tuapejat meliputi arah pengembangan wisata alam (pantai dan berselancar) Mapadegat, wisata alam (Pantai) Jati dan Wisata alam (pantai dan konservasi penyu) Betumonga. (Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019).

Selain wisata pantai terdapa juga wisata kuliner ekstrem yang disajikan oleh pantai Mapadeggat contohnya seperti Kapurut sagu, Batra, dan Toek. Terdapat juga jenis wisata kuliner modern seperti Sate Padang, mie goreng, mie rebus, pisang goreng coklat, roti bakar, segala Jus buah, kopi, teh dan lain sebagainya. Wisatawan yang berkunjung ke pantai Mapadeggat akan sangat nyaman dan lebih bebas untuk berpindah-pindah lokasi tempat wisata dikarenakan belum ada biaya parkir seperti di tempat wisata lainnya. Pelayanan di pantai Mapadeggat masih sangat sederhana, ramah dan melayani. Jenis wisata yang disediakan saat ini yaitu seperti Surfing, Berenang, Selam, dan Dayung sampan. Saat ini cafe-cafe juga

mulai banyak didirikan oleh pemuda setempat didekat pantai yang terbuat dari kayu magrove.

Pantai Mapaddegat di Dusun Mapadeggat Desa Tuapejat merupakan salah satu tempat wisata menarik yang terdapat di Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di tahun 2017 yang lalu, Pantai Mapaddegat sering diadakan acara-acara besar seperti memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan mentawai. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 188. 45347 Tahun 2014 mengatakan bahwa Dusun Mapaddegat telah ditetapkan sebagai kawasan desa wisata Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun sampai saat ini belum terlihat peningkatan wisatawan dan pengembangan potensi yang sudah tersedia di kawasan tersebut maka dari itu perlu diketahui faktor pengembangan potensi wisata bahari di kawasan tersebut serta penentuan strategi pengembangan guna keberhasilan rencana pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengembangan Wisata Pesisir Mapadeggat Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menganalisis faktor pengembangan potensi Wisata Pesisir Mapadeggat Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor pengembangan potensi Wisata pesisir Mapadeggat Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai?

2. Bagaimana kebijakan yang tepat untuk pengembangan wisata pesisir Mapadegat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai kedepan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji faktor pengembangan potensi wisata pesisir Mapadegat Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Untuk menganalisis kebijakan yang tepat guna pengembangan wisata pesisir Mapadegat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan dan pengembangan wisata pesisir di Mapadegat, Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak swasta yang terkait dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan wisata pesisir secara berkelanjutan di pantai Mapadegat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.